

## PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Epi Indah Serniati<sup>1\*</sup>, Anwar Parawangi<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to determine the evaluation of drinking water supply and sanitation programs in Tomoni Subdistrict, East Luwu Regency. This study used a descriptive qualitative research which tried to describe the environmental objective situation in the Timoni sub-district with its research informants as many as six (6) people. Data collection technique used observations, interviews, with a number of informants including sub-district staff, staff of the Public Works Office (PU), staff from the Health Office, water supply company staff, Tomoni sub-district village officials, and the community. The technique of checking the validity of the data used triangulation or method. Data analysis technique used interactive analysis. The results of this study showed that an evaluation of the water supply and sanitation program in Tomoni Subdistrict, East Luwu Regency had been effective, this was evidenced by the implementation of the Pamsimas program in most villages and sub-districts in the Timoni sub-district. But in the implementation there were certainly some obstacles or inhibiting factors: community awareness in maintaining facilities or tools that had been provided by the government, such as; toilets, water pipes, pipelines, water meters and others.*

**Keywords:** public, policy, pamsimas

### Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan keadaan objektif lingkungan yang ada di kecamatan Timoni dengan informan penelitiannya sebanyak enam (6) orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, terhadap sejumlah informan adalah staf kecamatan, staf Dinas Pekerjaan Umum(PU), staf Dinas Kesehatan, staf Perusahaan daerah air minum, aparat desa Kecamatan Tomoni, dan masyarakat. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian ini, evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan diimplementasikannya program pamsimas di sebagian besar desa-desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Timoni. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat, dinataranya adalah : kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas atau alat-alat yang telah disediakan oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** kebijakan, publik, pamsimas

---

\*epiindahserniati@gmail.com

## PENDAHULUAN

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Luwu Timur, belum terealisasi secara merata. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga banyak masyarakat yang pro dan kontrak dengan hadirnya program ini. Banyak keluhan-keluhan masyarakat yang ditemukan dalam pengimplementasian program ini. Penolakan Penyediaan air minum dan sanitasi ini, berawal dari isu akan adanya penambahan kilometer. Hal ini bertujuan agar dapat meratanya pasokan air bersih. Akan tetapi masyarakat merasa terbebani dengan bertambahnya kilometer yang ada di desa mereka sehingga bertambah pula iuran mereka dalam perbulannya. Sebagian besar masyarakat menolak program ini dengan alasan kurang minat dan kurang mampu untuk membayar, karna penduduk menganggap hampir kebanyakan mereka mempunyai sumur galian. Untuk mengatasi pasokan air bersih, masyarakat berharap pemerintah untuk segera mencari solusi terbaik dan dapat meringankan beban masyarakat.

Persoalan air bersih menjadi masalah yang harus segera dipecahkan agar masyarakat mudah untuk

mendapatkan pasokan air bersih. Masih banyak masyarakat yang mengeluh akan hal ini terutama di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Kurangnya air bersih di beberapa desa ketika musim kemarau tiba membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga masyarakat setempat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan keberadaan Penyediaan air minum dan sanitasi pada saat ini cukup memberikan sumbangsih kepada masyarakat setempat agar bisa merasakan air bersih didesanya, yaitu dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada salah satunya desa ujung baru.

Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok agar dapat mensejahterahkan masyarakat setempat salah satunya yaitu sebagai pelayanan publik yang mendasar, sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian

masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya Iskandar (2012).

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu Haerul, Akib & Hamdan (2016).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan / atau

kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan Wahyudi (2016). Oleh karena itu kebijakan tidak bersifat permanen. kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani Godin, Rein,& Moran (2006).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu dalam mengarah pada tujuan-tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang di buat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa

terkecuali. Sebelum kebijakan publik itu diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi merupakan salah satu program solusi dana nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, yang bertujuan menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi program, pembangunan sarana air bersih, pembentukan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan kesinambungan program Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari konteks perencanaan ditingkat kabupaten karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten.

Tujuan Program penyediaan air minum dan sanitasi adalah terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Secara rinci program penyediaan air minum dan sanitasi bertujuan untuk: (1) Meningkatkan Praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat, (2) Meningkatkan akses masyarakat dilokasi program terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan dikelola secara efektif, dan (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air bersih dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ruang lingkup Program Penyediaan air minum dan sanitasi mencakup lima (5) komponen program, yakni : (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.(2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. (3)

Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum. (4) Hibah insentif dan (5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Dalam bukunya “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” Menurut Mahmudi (2010:73) Evaluasi kinerja merupakan pelaporan kinerja harus memiliki dua manfaat utama yaitu bagi pihak internal dan eksternal. Berdasarkan dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bagi pihak internal laporan kinerja digunakan sebagai alat pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajer dan staf. Bagi pihak eksternal laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban organisasi. Laporan kinerja, bagi manajer memungkinkan untuk membandingkan antara *input* dan *output* yang direncanakan dengan realisasinya. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan, manajer dapat melakukan tindakan koreksi sebagai umpan balik. Evaluasi kinerja organisasi merupakan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja organisasional berdampak pada pemberian penghargaan, kritik yang sifatnya membangun, kenaikan pangkat, penugasan kembali, atau pemberhentian

dan pemecatan kepada manajer pusat pertanggungjawaban. (Mahmudi, 2010:73).

Evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan yaitu mengembangkan penilaian-penilaian yang dapat dipercaya. Penilaian terhadap unggulan dan nilai (assessment of merit and worth). Mustopadidjaja (Amirullah, 2012) mengatakan bahwa ”evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena. Kekeliruan dan kesesuaian (oversight and compliance) Secara umum kinerja yang dicapai. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan diterbitkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan.

Menurut Muchisin (Amirullah, 2012) evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produktif informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2012: 608). Untuk mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur suatu keberhasilan tersebut. Mengenai kinerja dalam menghasilkan informasi yang terdapat. Menurut William N. Dunn (2012) adapun kriteria evaluasi sebagai berikut; Efektivitas, Efesien, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kantor Kecamatan Tomoni dan enam Desa satu kelurahan yaitu kelurahan Tomoni, Desa Lestari, Desa Bayondo, Desa Kalpataru, Desa Sumber Alam, Desa Ujung Baru dan Desa Rante Mario. Dari ke enam Desa dan satu Kelurahan ini, peneliti jadikan tempat penelitian dengan pertimbangan baik tenaga, dana, waktu dan jarak tempat penelitian

dengan tempat tinggal peneliti yang dapat dijangkau dalam waktu kurang dari 30 menit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, kemudian cara pengumpulan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan tipe penelitian fenomenologi, untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu empiris yang diperoleh dari informan pada penelitian ini adalah staf Kecamatan Tomoni, staf Dinas Pekerjaan Umum (PU), staf Dinas Kesehatan, staf Perusahaan Daerah air minum (PDAM), aparat desa kecamatan Tomoni, masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam menganalisa data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan

kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Malili merupakan ibukota Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 11, 14% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi selatan dengan jumlah penduduk tahun 2017, berjumlah 243.064 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan yakni kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten luwu timur Salah satu kabupaten yang memiliki heterogenitas penduduk, beragam suku dan kebudayaan. Agar terwujudnya pemerintah yang baik di negara ini, sangat dibutuhkan adanya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Kondisi Geografis Kantor Kecamatan Tomoni Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah 230.09 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Mangkutana disebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu, Burau dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan yang seluruh desa/kelurahanya berstatus desa definititif. Wilayah Kecamatan Tomoni adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai, secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. Terdapat satu sungai yang mengalir kecamatan ini yaitu sungai Tomoni. Pemerintahan pada tahun 2019 di Kecamatan Tomoni terdapat 52 dusun dengan 110 RT. Visi dan Misi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Untuk saat ini masih gabung dengan visi dan misi Kabupaten demi mewujudkan pelayanan yang prima, efektif dan efisien, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Visi Kecamatan Tomoni

yaitu; Keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Sedangkan untuk Misi yaitu; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebaik-baiknya, Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia didaerah untuk menjadi handal, berdayaguna, berhasilguna, untuk selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi dalam kemajuan daerah, Menjaga suasana kebersamaan antar kompenen warga agar tetap harmonis, tertib dan aman guna menunjang hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan bermartabat dalam kesesuaian tatanan nilai-nilai budaya luhur dan tuntunan agama.

Kecamatan Tomoni mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemeberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.

Tugas Kecamatan Tomoni mempunyai rincian sebagai berikut: Menetapkan rencana strategi, program dan rencana kerja kecamatan, Menyelenggarakan segala urusan Pemerintahan secara umum, serta

mengkoordinasikan beberapa kegiatan pemberdayaan yang ada masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan, Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan, dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

### **Efektifitas dan Efesiensi**

Efektifitas merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan alternatif atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan. Persoalan air minum dan sanitasi lingkungan tentu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menikmati manfaat dari



penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan tersebut perlu dilakukan dengan seefektif mungkin oleh semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan Efisien merupakan sesuatu yang berkaitan dengan waktu yang digunakan tepat atau malah sebaliknya. Berdasarkan data yg diperoleh peneliti, kec.tomoni memprogramkan air bersih dan sanitasi untuk lima tahun kedepan sudah efisien, sebab tujuh desa di kecamatan tomoni sudah terealisasi selama dua tahun terakhir. Artinya masih ada enam desa untuk dikerjakan tiga tahun kedepan.

Berdasarkan pemaparan dan data diatas, bahwa program penyediaan air minum dan sanitasi sampai saat ini dapat dikatakan efektif dan efisien, berjalan dengan baik dan semua program yang dikembangkan bersifat akuntabilitas sesuai dengan rencana pemerintah kecamatan tomoni serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk wilayah Kecamatan Tomoni khususnya. Program penyediaan air minum dan sanitasi yang di hadirkan oleh Kecamatan Tomoni ada 2 (dua) yaitu, dalam bentuk Air Pam dari PDAM dan Pamsimas yang di

berdayakan oleh masyarakat setempat. Program penyediaan air minum dan sanitasi yang ada di Kecamatan Tomoni dapat dikatakan efektif dan efisien serta akan terus ditingkatkan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan peduli akan lingkungan sekitar.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa untuk pelayanan Air Pam yang ada di Kecamatan Tomoni tidak efektif. Hal ini dipicu karna kurang lancarnya air yang mengalir didesa tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat mengeluh akan hal ini. Namun sebagian besar masih ada masyarakat yang menggunakan air dari sumur galian, Walaupun program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi terlaksana namun masih ada masyarakat yang tidak menggunakan Air Pam.

Berdasarkan pemaparan diatas menurut peneliti bahwa masih ada masyarakat yang enggan menggunakan Air Pam dikarnakan sudah menjadi kebiasaan mereka menggunakan air dari sumur galian, mereka menganggap bahwa Air pam terlalu banyak mengandung zat kapur. Sehingga menyebabkan beberapa sebagian masyarakatan memilih untuk menggunakan air dari sumur galian untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk di Kecamatan Tomoni sebagian juga

masyarakatnya menggunakan keduanya baik air pam maupun air dari sumur galian.

Dari hasil wawancara peneliti dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan keduanya, artinya masih kurang efektif dalam pelayanan dan pemanfaatannya. Sebab mereka masih menggunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau tiba. Adapula masyarakat yang ingin sekali menggunakan air pam yang ada di Kecamatan Tomoni. Namun masih terkendala dalam proses

Dari hasil wawancara peneliti dapat dikatakan bahwa kerja sama antar Dinas Pekerjaan Umum bagian pengairan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sudah sangat efisien dan efektif. Fenomena dilapangan menggambarkan bahwa proyek kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di masyarakat adalah sebagai sasaran dari program pemberdayaan, dikatakan demikian karena dengan diberikannya bantuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi ini diharapkan dapat memberikan layanan kebutuhan air minum secara berkelanjutan dengan kualitas yang dapat diterima oleh pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat maupun pemerintah.

Mencukupi kebutuhan dan keterlibatan partisipasi dari masyarakat dalam pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air minum tetap berfungsi dan berjalan.

### **Kecukupan**

Kecukupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan program air minum dan sanitasi di kecamatan Tomoni. Dalam upaya pelaksanaan implementasi kebijakan publik tertentu sarana dan prasarana menjadi sesuatu yang penting untuk diadakan guna tercapainya tujuan dari program tersebut dengan pendekatan asas efektif dan efisiensi dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber atau informan penelitian, maka peneliti mencoba menyimpulkan bahwa berkaitan dengan kecukupan sarana dan sarana penunjang dalam program pengadaan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan di Kecamatan Tomoni bahwa masih banyak sarana dan prasarana yang kurang terpunuhi seperti misalnya jumlah meteran air yang masih kurang lantaran keterlambatan distribusi dari pusat, pengadaan pipa air sehingga pemasangannya membutuhkan waktu yang lama. Lebih lanjut dapat

peneliti katakana bahwa ketersediaan air minum saat musim kemarau mengalami pengurangan lantaran yang menjadi sumber utama kebutuh air masyarakat adalah air hujan yang ditampung baru kemudian didistribusi melalui pipa-pipa yang telah dipasang ke rumah-rumah warga.

### **Perataan**

Perataan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana program penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan di Kecamatan Timoni dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan publik tentu ada indikator atau tolak ukur yang dipakai agar kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan kata lain adanya pemerataan. Terkait masalah pemerataan dalam program air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan oleh beberapa dinas terkait, peneliti telah melakukan wawancara dengan PDAM.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan penelitian di atas terkait indikator Perataan dari program penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan oleh pemerintah kecamatan Tomoni, dapat dikatakan sudah cukup merata karena sudah

menjangkau lapisan-lapisan masyarakat yang secara geografis kewilayaan cukup susah untuk dijangkau telah menikmati air minum PDAM. Namun dalam realisasi pelaksanaannya masih banyak warga yang mengeluhkan rusaknya meteran air yang berdampak pada aktivitas ibu-ibu rumah tangga.

### **Responsivitas**

Responsivitas merupakan suatu respon tanggapan dari seseorang mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan hubungan dalam penelitian ini, responsivitas yang dimaksud adalah respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal pengadaan air bersih dan sanitasi.

Terkait masalah responsivitas masyarakat dalam hal program air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan oleh beberapa dinas terkait, peneliti telah melakukan wawancara dengan pemerintah dan masyarakat terkait.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan terkait indikator responsivitas dari program penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan oleh pemerintah kecamatan Tomoni, dapat dikatakan respon masyarakat terhadap program ini sudah bagus, hanya saja ada beberapa hal yang

harus pemerintah benahi seperti yang dikatakan responden terkait masalah administrasi.

### **Ketepatan**

Ketepatan dapat dikatakan apakah program kegiatan tersebut tepat atau cocok dilaksanakan di lingkungan terkait atau tidak. Ketepatan juga dapat di tafsirkan apakah program terkait tepat mengenai sasaran atau tidak. Dilihat dari keadaan geografis masyarakat Tomoni program air bersih dan sanitasi sangat tepat diadakan. Hanya saja persoalan ketepatan sasaran yang akan menjadi pembahasan mendalam peneliti selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa terkait indikator ketepatan program penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan Tomoni dapat dikatakan cukup tepat sasaran. Hal menjadi indikator peneliannya adalah masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum dilayani dengan baik. Selain itu juga, masih sering terjadinya kerusakan pada meteran air yang dikeluhkan oleh warga, meskipun telah dilakukan upaya perbaikan terhadap meteran air oleh pihak PDAM.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan data yang telah disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa penerapan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kecamatan Tomoni, terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah di inginkan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Tujuan program penyediaan air minum dan sanitasi adalah terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Secara rinci program penyediaan air minum dan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup sehat bersih di lingkungan dan sehat di masyarakat, meningkatkan akses masyarakat dilokasi program pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan dikelola secara efektif, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasiannya dalam pelaksanaan teknis, seperti pengadaan stok barang, penambahan jumlah barang dan masalah akses jaringan ketempat lokasi. Penerapan Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi merupakan program Nasional yang dilanjutkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di wilayah Kecamatan Tomoni.

Program Penyediaan Air Minum di Kecamatan Tomoni ada 2 (dua) macam yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tomoni dan Desa/kelurahan Tomoni. Pertama dalam bentuk Air Pam dan yang ke dua dalam bentuk Air Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat setempat dan hanya ada di Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa masalah yang belum bisa dipecahkan. Sehingga peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur harus lebih gencar lagi melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, kegiatan atau program baru yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media social dan media cetak, karena banyaknya miskomunikasi yang terjadi antara masyarakat dan aparat pemerintahan dan instansi yang bersangkutan, kurangnya manajemen waktu juga membuat banyak ketidak pastian dalam

pelaksanaanya. (2) Dalam menjalankan beberapa program sekaligus yang begitu banyak, sebaiknya pihak Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur lebih mengkondisionalkan lagi, untuk program yang hamper sama dengan tujuan dan sasaranya akan lebih baik lagi diperbaharui kembali atau dihentikan sehingga tidak hanya menjadi wacana. (3) Masyarakat sebagai pelanggan atau pengguna jasa layanan seharusnya menyadari dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi saat ini dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga program layanan yang diberikan Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dapat dimaksimalkan secara menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmanson. 2018. *Program Pamsimas Tidak dinikmati di masyarakat di Lutim*. Celesonline. Pada tanggal 22 februari 2018. (<https://celebesonline.com>) Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.
- Afriadi, Wahyono, 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol 8 No. 4. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

- Islamy,2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi, 2010.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Methasari,A, Subowo.A. 2016. *Evaluasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. Journal of Public Policy And Management Review. Vol 5 No. 2 Diakses pada tanggal 18 Februari 2019.
- Nazar, Dkk. 2018.*Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiahkuala. Vol Special Issue No. 4.(<http://new.pamsimas.org>)Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018
- Nilasari, Dias. 2017. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Wawangiru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*.Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ramdhani, M,A.,&Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*: Jurnal Publik, Vol 11 No.2. ([www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)).Diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- Ranger,Park.2019.*Evaluasi Kebijakan Publik (W.Duun)*.Scribd. pada tanggal 26 Maret 2019. (<https://www.scribd.com>).Diakses pada tanggal 12 Februari 2019
- Thoha,M.(2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tri Astuti, R. & Rahdriawan, M. 2013.*Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas di Lingkungan Permukiman Kecamatan Mijen Kota Semarang*.Jurnal Teknik PWK, Vol 2 No. 4. (<http://ejournal-undip.ac.id/index.php/pwk>)Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019
- Wahab,S.A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka.
- Wahyudi, A. (2016).*Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*.Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol 2 No.2. (<http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>).Diakses pada tanggal 25 Juni 2019.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.